



PILWALI 2011

Inspektorat Siapkan Pemeriksaan

GONDOKUSUMAN - Laporan masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dua pegawai negeri sipil (PNS) dengan memanfaatkan posisinya untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) terus bergulir. Inspektorat Kota Jogja menyeriusi pengawasan terhadap pelanggaran ini.

"Kami lakukan itu (pengawasan)," kata Sekretaris Inspektorat Kota Jogja Rani Utari saat ditemui di kantornya kemarin (4/8).

Rani menjelaskan pengawasan terhadap kinerja PNS terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2011 menjadi salah satu fokus pengawasan Inspektorat. Dalam beberapa kali rapat, hal ini sering kali disinggung. "Tapi, untuk hasilnya seperti apa, kami belum mendapatkan. Karena, masih dalam proses bekerja," jelasnya.

Sanksi terhadap kedua PNS yang dari hasil pengawasan Panwaslu terbukti menyalahgunakan jabatan tersebut, Rani enggan untuk menjelaskan. "Tunggu besok Senin, biar Inspektur (Wahyu Widayat) yang menjelaskan," katanya.

► Baca Inspektorat... Hal 23



INSPEKTORAT...
Sambungan dari hal 13

Sebelumnya, saat Komisi A DPRD Kota Jogja melakukan rapat kerja dengan Panwaslu dan KPU Kota Jogja, terungkap adanya dua oknum PNS yang melanggar disiplin PNS. Kedua PNS tersebut dilaporkan masyarakat karena kedapatan mendukung salah satu bakal pasangan calon (bapaslon).

Ketua Panwaslu Heri Joko Setyo menyebutkan kedua PNS tersebut memanfaatkan jabatannya untuk mendukung salah satu bapaslon. "Satu adalah PNS di rumah sakit negeri dan satunya lagi adalah isteri camat yang memanfaatkan posisinya sebagai penggerak PKK untuk mendukung salah satu kandidat," ujar Heri Joko.

Heri menerangkan, Panwaslu mengetahui pelanggaran dua orang PNS tersebut dari laporan masyarakat. Hasilnya, saat proses klarifikasi Panwaslu menemukan adanya kesegajaan atas pelanggaran tersebut.

"Satu PNS di rumah sakit berusaha untuk memanfaatkan posisinya mendukung salah satu bapaslon. Satu-satunya Bu Camat mengumpulkan warga yakni para jumentik yang kemudian diarahkan untuk mendukung salah satu bapaslon," imbuhnya.

Atas laporan tersebut, proses klarifikasi dengan memanggil bapaslon yang bersangkutan telah dilakukan Panwaslu. Kedua PNS tersebut mengelak telah melakukan pelanggaran.

PNS yang bekerja di rumah sakit negeri mengaku dukungan kepada salah satu bapaslon tersebut sebagai bagian tugasnya melayani seluruh pasien.

Sedangkan seorang isteri camat yang dilaporkan mendukung bapaslon tertentu juga mengelak. Dia hanya mengatakan pengumpulan jumentik tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan tugasnya.

"Soal imbauan mendukung salah satu bapaslon, itu soal kesalahan," jelasnya.

Meski, telah menemukan pelanggaran, Heri mengaku Panwaslu tak bisa melakukan penindakan terhadap kedua PNS tersebut. Ini tak lepas karena belum lengkapnya unsur-unsur pelanggaran. Yakni, ada paslon, alat peraga, dan visi misi pemilihnya. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk menentukan terjadi pelanggaran.

"Karena sekarang untuk unsur paslon belum terpenuhi, kami hanya bisa melakukan pencegahan saja. Supaya aksi-

aksi serupa tak terulang kembali saat paslon sudah ditetapkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, Panwaslu akan melakukan langkah pencegahan dan pengawasan semaksimal mungkin. "Ini sebagai langkah antisipatif saja," jelas Sudarmanto, anggota lain Panwaslu.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Eko Kasbiantoro menyambut positif inisiatif Inspektorat yang sudah melakukan pengawasan. Apalagi, tanggal 11 Agustus mendatang, KPU Kota Jogja sudah menetapkan bapaslon menjadi paslon.

"Sebelum ditetapkan, Inspektorat memang harus mengawasi dengan serius mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran. Termasuk PNS, karena setelah penetapan tim sukses non-PNS pastinya sulit menggelar acara," tuturnya. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005